

Heru Budi Hartono Buka Suara Soal Pencopotan Marullah Matali

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara soal pencopotan Sekda DKI, Marullah Matali. Heru minta pengangkatan Marullah sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata jangan disalahpahami. Menurut Heru, dia membutuhkan peran Marullah Matali untuk menangani sejumlah agenda kegiatan pada 2023. DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah beberapa event besar, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2023. Jakarta juga akan menjadi tuan rumah pertemuan gubernur dan wali kota ASEAN.

"Jadi jangan disalahpahami. Saya membutuhkan Pak Marullah dalam skala yang lebih besar," kata Heru sebelum memimpin rapat internal persiapan Natal dan Tahun Baru di Balai Kota Jakarta, Senin (5/12).

Dalam pertemuan regional Asia Tenggara, Jakarta akan menjadi tuan rumah karena Indonesia adalah Ketua ASEAN pada 2023. Pada kegiatan tersebut, sejumlah kepala negara ASEAN akan melakukan rangkaian pertemuan, baik level kepala negara dan level menteri.

"Salah satu tugas tambahan yang terhormat untuk Pak Deputi bisa bersama saya untuk mempersiapkannya," kata Heru.

Heru dan Marullah Matali akan bergantian memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah pusat

untuk persiapan teknis pertemuan kepala negara ASEAN itu. Mulai dari sarana dan prasarana, tempat pertemuan hingga tempat wisata yang akan dikunjungi dan jamuan makan malam.

"Kalau saya didampingi deputi, sekda dan seluruh jajaran, kami bisa selesaikan," ujar Heru Budi.

Sejumlah persiapan menyambut agenda besar ASEAN itu akan disebut. Menurut Heru, agenda itu perlu dipersiapkan sejak dini karena akan berlangsung berdekatan dengan bulan puasa dan lebaran, HUT DKI pada 22 Juni serta HUT RI.

Heru mengatakan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan agenda besar itu hanya 3 bulan, yaitu Januari, Februari dan Mei 2022 karena Maret dan April masuk puasa dan Lebaran.

Selain agenda pertemuan kepala negara ASEAN, Jakarta juga akan menjadi tuan rumah ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2023. Jakarta juga menjadi tuan rumah pertemuan gubernur dan wali kota ASEAN.

"Bisa dibayangkan betapa sibuknya kami di 2023," katanya.

Sebelum rapat internal di Balai Kota, Heru Budi Hartono menyerahkan Surat Keputusan Presiden Nomor 139/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pemprom DKI kepada Marullah Matali. ● yan

4 | Metropolis

FOTO:ANT



AKSI WARGA KAMPUNG BAYAM DI DEPAN BALAI KOTA JAKARTA

Warga korban pengusuran Kampung Bayam menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/12). Aksi warga Kampung Bayam mengungsi dengan mendirikan tenda dan membawa perabotan rumah tangga tersebut untuk menuntut PT Jakarta Propertindo (JakPro) segera menyerahkan kunci hunian Kampung Susun Bayam (KSB) yang sebelumnya telah diresmikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta memberikan harga sewa yang murah.

Perayaan Ibadah Natal di Jakarta Disesuaikan dengan Aturan PPKM

Aturan pelaksanaan Natal 2022 dan tahun baru 2023 akan bergantung pada PPKM pada 20 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. "Kita akan lihat nanti ada instruksi atau ada keputusan dari pemerintah pusat yang terkait dengan aturan perayaan Natal," ungkap Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Marullah Matali.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan menyesuaikan perayaan ibadah Hari Raya Natal tahun 2022 dengan aturan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat itu.

"Kegiatan Natal tentu adalah kegiatan yang menjaga kerukunan umat beragama dan melibatkan semua. Kegiatan ini penting tapi pertimbangannya, tetap kami akan melihat PPKM yang berlaku," kata Marullah usai rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta,

Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Marullah menyebutkan aturan pelaksanaan Natal 2022 dan tahun baru 2023 akan bergantung pada PPKM pada 20 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. "Kita akan lihat nanti ada instruksi atau ada keputusan dari pemerintah pusat yang terkait dengan ini (aturan perayaan Natal). Tentu akan menjadi pertimbangan gitu ya," ungkap Marullah.

Di sisi lain, jika momen Natal dan tahun baru dilaksanakan dalam status PPKM

level 1, maka perayaan akan dilaksanakan seperti tahun kemarin. "Kami akan monitor. Pemerintah pusat akan mengeluarkan PPKM apa. Kalau masih normatif seperti yang sekarang level 1, maka memungkinkan kita laksanakan dengan baik," sebut Marullah.

Nantinya, Gubernur hingga Wali Kota masing-masing wilayah untuk berkunjung ke gereja-gereja. "Selain dari Gubernur, nanti akan ada Wali Kota juga berkunjung ke gereja-gereja yang ada di lingkup wilayahnya masing-masing," pungkas dia.

Memecah Konsentrasi Massa

Sementara itu, terkait perayaan malam tahun baru 2023, akan digelar di tingkat provinsi hingga tingkat kota administratif. "Tempat perayaan tahun baru (digelar) secara tingkat provinsi dan di tingkat kota. Begitu juga Natal di tingkat provinsi dan di tingkat kota," kata Marullah.

Marullah menjelaskan, perayaan digelar tidak terpusat agar memecah konsentrasi massa.

"Selain provinsi, kita siapkan tingkat kota agar pertimbangannya agar konsentrasi massanya agak sedikit terpecah karena kondisinya masih PPKM di DKI Jakarta," jelas Marullah.

"Kita juga antisipasi beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan baik di Jakarta maupun di tempat-tempat lain selain dari Jakarta," imbuh dia.

Pemecahan konsentrasi massa ini dilakukan untuk mengantisipasi kerusuhan dalam kerumunan dan hal-hal buruk lainnya terkait kerumunan massa.

"Konsentrasi massa kadang-kadang ada yang imbasnya positif bagus. Tapi, kita antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Jakarta. Seperti beberapa waktu yang lalu hampir terjadi hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu, kita antisipasi ini dengan sebaik-baiknya," ungkap Marullah. ● yan

FOTO:ANT



TANJIDOR SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Pemain grup musik mementaskan kesenian Tanjidor memainkan alat musik horn dalam "Hajatan Keren Orang Bekasi" di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jl. Ahmad Yani Bekasi, Jawa Barat, Minggu (4/12). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan seni pertunjukan orkes Tanjidor sebagai warisan budaya takbenda (WBTb) Indonesia tersebut agar tetap lesatari dan tidak punah.

Bangunan Tanpa Izin Tidak Dibongkar, Warga Kecewa ke Pemkot Jakpus

JAKARTA (IM) - Warga Rajawali Selatan (Rasela) I, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat kecewa kepada Satpol PP setempat. Pasalnya, bangunan 5 lantai tak berizin dekat permukiman warga masih berdiri tegak. Satpol PP Jakarta Pusat hanya membongkar bagian lantai saja.

"Warga kecewa pembongkaran yang dilakukan Satpol PP hanya bagian lantainya dan cuma dibongkari doang. Seharusnya diratakan dengan tanah," ujar Ketua RW 005 Kelurahan Gunung Sahari Utara (GSU), Amung, Senin (5/12).

Padahal, sebelumnya Pemkot Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Penataan (Sudin Citata) telah memasang segel berwarna merah di depan bangunan lantai di Rasela I No 33 RT 005/002, Gunung Sahari Utara itu. Karena dibangun

tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Satpol PP juga telah membongkar bangunan di lantai 3, 4, dan 5 sehingga dengan hilangnya segel bangunan tersebut banyak yang menyanayakan.

"Warga juga menanyakan kenapa segel-segel tapi dibiarkan. Saya sudah menanyakan ke pihak Citata Kecamatan Sawah Besar, namun dijawab kewenangan pusat atau Sudin Citata Jakarta Pusat," kata Amung.

"Kami berharap Pemkot Jakpus atau Sudin Citata melaporkan ke pihak kepolisian karena ada sanksi pidananya," sambungnya Ketua LMK RW 02, Arfai berharap ada tindakan tegas dari Pemkot Jakpus supaya tidak menimbulkan kecewauruan dan pertanyaaan warga. "Pemkot Jakpus harus bertindak tegas. Jangan sampai dilecehkan oleh warga yang membangun tanpa IMB," ujarnya. ● yan



PAMERAN FOTO SAMBUT HARI HAM SEDUNIA

Pengunjung mengamati karya foto pada pameran foto bertema 'World Human Rights Day 2022 Photography Exhibition' di Terowongan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta, Senin (5/12). Pameran yang menampilkan tujuh karya foto cerita tersebut diselenggarakan oleh Pewartu Foto Indonesia (PFI), Komnas HAM, dan UNESCO guna mengkampanyekan penegakan HAM serta menyambut Hari HAM Sedunia 2022.

PT MALEO PRIVATE EQUITY ("Perseroan")

PENGUMUMAN PENINGKATAN MODAL KARENA KONVERSI UTANG YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Untuk memenuhi ketentuan dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham; dan
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Direksi Perseroan dan seluruh pihak yang terkait dengan ini mengumumkan rencana:

- peningkatan modal dasar Perseroan, dari semula sebesar Rp. 10.000.000.000 menjadi. Rp 500.000.000.000;
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dari semula sebesar Rp 10.000.000.000 menjadi sebesar Rp 183.000.000.000 yang berasal dari konversi utang sebesar Rp 173.000.000.000 yang diambil bagian oleh Maleo Investment Holdings, Pte. Ltd.

Setelah terlaksananya peningkatan modal di atas, maka akan terjadi perubahan pemegang saham pengendali dalam Perseroan, dari sebelumnya Quarterback Capital Holdings Limited menjadi Maleo Investment Holdings, Pte. Ltd.

Jika ada pihak yang keberatan terhadap rencana perubahan pemegang saham pengendali tersebut, agar mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak pengumuman ini dikeluarkan.

Jakarta, 6 Desember 2022

Direksi

PT Maleo Private Equity

Pemkot Jaksel Razia Topeng Monyet

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan merazia topeng monyet yang ada di wilayah itu sebagai upaya pencegahan eksploitasi hewan.

"Kami rutin melakukan razia pelaku usaha topeng monyet," kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Selatan, Hasudungan A. Sidabalok saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/12).

Hasudungan menuturkan belum ada pelaku usaha yang tertangkap dalam kegiatan penertiban topeng monyet yang dilakukan petugasSudin KPKP Jakarta Selatan (Jaksel). Kendati demikian, pihaknya terus mengencarkan razia atas laporan keberadaan topeng monyet yang disampaikan oleh warga. Hal itu sebagai bentuk tindakantegas sesuai aturan yang berlaku.

"Terakhir giat dilakukan di Jalan H RT 07 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, dan akan terus berlanjut

ke wilayah lainnya, tergantung laporan dari warga," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Satpol PP, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) wilayah dan organisasi non profit Jakarta Animal Aid Network (JAAN).

Hasudungan mengimbau kepada warga jika melihat topeng monyet yang masih berkeliraran bisa menghubungi Sudin KPKP Jaksel maupun satuan pelaksana (satlak) setiap kecamatan dengan mengirim pesan ke Instagram. "Jika pelaku usaha berhasil ditangkap maka monyet akan disita untuk dilepasliarkan (reintroduksi) di habitatnya dan pemilik diproses hukum," katanya.

Topeng monyet telah dilarang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 lantaran melanggar KUHP Nomor 302 yang mengatur penyiaksan hewan.

Peraturan Kementan Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66 Ayat 2 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selain itu PeraturanDaerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 Pasal 11 Ayat 2 tentang Ketertiban Umum. ● yan

LELANG NONEKSEKUSI SUKARELA TERJADWAL KHUSUS

Balai Lelang PT. Balai Lelang Nasional melalui Pejabat Lelang Kelas II Wilayah DKI Jakarta akan melaksanakan Lelang Nonekseksi Sukarela Terjadwal Khusus untuk barang-barang bergerak.

Syarat & ketentuan:

- Sebelum mengikuti lelang, peserta lelang wajib mendaftarkan diri dengan menghubungi (021) 2258 6811.
- Objek lelang dijual dalam kondisi yang sebenarnya.
- Pelaksanaan lelang dilakukan melalui konferensi video daring (online video conference). Tautan akan dikirim melalui WhatsApp kepada peserta lelang 3 (tiga) jam sebelum pelaksanaan lelang.
- Lelang dilakukan dalam 2 (dua) hari dengan jadwal pelaksanaan:
 - (1) Senin, 12 Desember 2022, Pukul 14.30 WIB s.d 15.00 WIB;
 - (2) Senin, 12 Desember 2022, Pukul 15.00 WIB s.d 15.15 WIB;
 - (3) Senin, 12 Desember 2022, Pukul 15.15 WIB s.d 15.30 WIB;
 - (4) Senin, 12 Desember 2022, Pukul 15.30 WIB s.d 15.45 WIB;
 - (5) Senin, 12 Desember 2022, Pukul 15.45 WIB s.d 16.00 WIB;
 - (6) Kamis, 15 Desember 2022, Pukul 14.30 WIB s.d 15.00 WIB;
 - (7) Kamis, 15 Desember 2022, Pukul 15.00 WIB s.d 15.15 WIB;
 - (8) Kamis, 15 Desember 2022, Pukul 15.15 WIB s.d 15.30 WIB;
 - (9) Kamis, 15 Desember 2022, Pukul 15.30 WIB s.d 15.45 WIB;
 - (10) Kamis, 15 Desember 2022, Pukul 15.45 WIB s.d 16.00 WIB;

5. Rincian barang yang akan dielang dapat dilihat langsung di PT. Balai Lelang Nasional yang beralamat di:

Sunrise Garden
Jl. Surya Nirmala Blok O no. 12, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

6. Penawaran dilakukan secara naik-naik dan dibacakan secara lisan satu per satu.

7. Peserta lelang yang dinyatakan menang wajib melakukan pelunasan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ke rekening Balai Lelang PT Balai Lelang Nasional.

8. Pemegang lelang wajib membawa identitas asli dan bukti pembayaran untuk pengambil barang lelang.

Informasi : (021) 2258 6811

Jakarta, 6 Desember 2022
Balai Lelang PT Balai Lelang Nasional